



**LAPORAN KINERJA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2020**

SIMAK  **BPK RI**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 dan disampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 disusun untuk memenuhi Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kerja pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengamanatkan setiap pimpinan Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja BPK. Laporan Kinerja satuan Kinerja Eselon II disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 menyajikan capaian evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam perjanjian kinerja. Pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis tersebut memuat informasi terkait capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama, penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja, penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran dan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, Perwakilan Provinsi Maluku berharap Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan perbaikan kinerja perwakilan di Tahun 2021. Dengan demikian, Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan perbaikan dalam kerjanya secara efektif, efisien dan berkesinambungan, untuk mencapai rencana strategis BPK.

Ambon, 29 Januari 2021

Kepala Perwakilan,



Muhammad Abidin S.E., Ak., CA, CSFA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, SERTA ISU STRATEGIS	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA	13
B. REALISASI ANGGARAN.....	21
BAB IV	
PENUTUP	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan penandatanganan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020, perlu disusun suatu Laporan Pencapaian Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, kendala yang dihadapi, dan usulan untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam SIMAK BPK RI adalah membandingkan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) 2020. Laporan kinerja ini harus disampaikan kepada Auditorat Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI dengan tembusan kepada Kepala Direktorat

Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Tugas, Fungsi, serta Isu Strategis pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku dibuka pada tanggal 20 Desember 2006 dengan sebutan Kantor Perwakilan BPK RI di Ambon. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I- XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I- XIII.2/9/2017, pada Pasal 722 ayat (1) juga menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku, Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melakukan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku memiliki 12 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 pemerintah provinsi, 2 pemerintah kota, dan 9 pemerintah kabupaten).

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di tahun 2019 sebesar 72,74% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan yang menghambat penyelesaian tindak lanjut.
- b. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang berisiko menurunkan reputasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- d. Jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengadakan *in house training* di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan membawahi tiga unit kerja sebagai berikut:

A. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

B. Subauditorat Maluku I

Subauditorat Maluku I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

C. Subauditorat Maluku II

Subauditorat Maluku II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a. merumuskan rencana kegiatan;
- b. mengusulkan tim pemeriksa;
- c. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- j. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- l. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

D. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 yaitu menyampaikan pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam perjanjian kinerja yaitu Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2020. Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) satuan Kerja eselon II
2. Realisasi pencapaian target kinerja Unit Kerja Eselon II
3. Penjelasan yang memadai tentang hal-hal yang mendorong dan menghambat pencapaian target kinerja
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis BPK
5. Penjelasan mengenai keluaran kinerja dikaitkan dengan pemanfaatan anggaran (penganggaran berbasis kinerja), dan
6. Rencana aksi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 telah disepakati oleh Kepala Perwakilan dan Tortama KN VI yang dituangkan dalam PKPK 2020. Adapun rincian Sasaran Strategis (SS), dan target Indikator Kinerja Unit (IKU) 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian sasaran strategis (SS) dan Target IKU 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp20.642.164.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.128.298.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp12.513.866.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

Target IKU Tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku meliputi 13 IKU yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber

daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei:
 - a. 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
 - b. 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
 - c. 3,00 - 3,99 = memuaskan
 - d. 4,00 - 5,00 = sangat memuaskanIndikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Analytic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan

ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi diatur sebagai berikut:

- 1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- 2) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
- 3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi

dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan SIMAK periode Triwulan IV Tahun 2020 meliputi 13 IKU, dimana Perwakilan mendapatkan skor IKU keseluruhan 98,97. Berikut adalah rincian pencapaian IKU yang dimaksud:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,67%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,13%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,71%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,59
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	86,90
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,71%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,06
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	90,24%
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	88,78%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Adapun capaian kinerja, evaluasi dari masing-masing sasaran strategis akan diuraikan dibawah ini.

a. IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan)

Quality Control (QC) dan *Quality Assurance (QA)* pemeriksaan dilaksanakan setelah pemeriksaan selesai. Sampai dengan akhir Triwulan IV 2020 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan, dimana QA dan QC seluruhnya dilaksanakan pada

12 pemeriksaan LKPD TA 2019. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyelesaikan 6 Pemeriksaan Kinerja dan 4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Semester 2 tahun 2020, dimana QA dan QC juga telah dilaksanakan seluruhnya pada 10 pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 83,34%, dimana skor tersebut didapat dari Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 66,67%, dan Tingkat Akurasi atas LHP sebesar 100%. Selain itu, hasil rewiu Inspektorat Utama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor penilaian sebesar 100%. Capaian-capaian tersebut menghasilkan skor IKU 1 sebesar 91,67%. Realisasi tersebut belum memenuhi target tahunan yaitu 100%.

b. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah 100%. Realisasi tersebut telah memenuhi target 2020 yaitu 100%.

c. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)

Pemantauan TLRHP pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d 4 Desember 2020 sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 138.d/ST/XIX.AMB/12/2020 tanggal 17 November 2020. Sampai dengan Laporan IKU Triwulan IV Tahun 2020 disusun, laporan atas pemantauan TLRHP belum selesai disusun dan dimintakan persetujuan kepada Anggota VI BPK dan Tortama KN VI untuk status I dan IV, sehingga realisasi Triwulan IV tahun 2020 masih menggunakan data Triwulan III Tahun 2020 yaitu sebesar 73,13%. Realisasi tersebut belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu sebesar 75%.

d. IKU 4 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan 6 Pemeriksaan Tematik Nasional sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2020 yaitu 6.

e. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan)

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2020, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

f. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)

Pemeriksaan Tematik Lokal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, dimana Pemeriksaan Tematik Nasional berjumlah 0. Realisasi ini sesuai dengan target RKP Tahun 2020 yaitu 0.

g. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku menunjukkan skor sebesar 4,59. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2020 yaitu 5,00.

h. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)

Evaluasi AKIP yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPK RI. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 399/ND/XI/09/2020 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai sebesar 86,90 dengan predikat A (Memuaskan). Realisasi ini telah sesuai dengan target tahunan yaitu sebesar 86,00 dengan predikat A (Memuaskan).

i. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)

Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi berdasarkan data dari Biro TI sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah sebesar 98,71%, yang dapat dirinci sebagai berikut: tingkat pemanfaatan layanan dasar sebesar 100%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum sebesar 94,85%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan sebesar 100%, dan tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan sebesar 100%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari target tahun 2020 yakni sebesar 95%.

j. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah membuat usulan atas *Best Practice* melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku No. 418/ND/XIX.AMB/12/2020 yang berjudul Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Melalui Aplikasi *SMART (Service Management Kesekretariatan Terpadu)*. BPK Perwakilan Provinsi Maluku juga telah melaksanakan implementasi serta pelaporan penerapan *Best Practice* yang berjudul Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Aktivitas *Knowledge Management* melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Maluku No. 426/ND/XIX.AMB/12/2020. Atas realisasi ketiga poin tersebut mendapatkan nilai 100%. Realisasi ini telah sesuai target tahun 2020 yaitu 100%.

k. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan skor sebesar 4,06. Realisasi ini lebih tinggi dari target Tahun 2020 yaitu 3,80.

l. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)

BPK Perwakilan Provinsi Maluku menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2019 pada Triwulan I Tahun 2020. Sampai dengan periode pelaporan IKU, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mencatat presentase

pegawai yang memenuhi standar jam Diklat Pengembangan Kompetensi sebesar 90,24%. Persentase ini belum memenuhi target Tahun 2020 yaitu 100%.

m. IKU 13 (Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran)

Berdasarkan Hasil Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2020 yang dilakukan oleh Biro Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai 88,78% dengan rincian: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 86,88% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 91,63%. Persentase ini sudah melebihi dengan target Tahun 2020 yaitu 87%.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian kinerja IKU pada Tahun 2015 sebesar 98,19, kemudian meningkat di Tahun 2016 sebesar 98,67. Pada Tahun 2017, Perwakilan Provinsi Maluku berhasil meraih skor capaian IKU sebesar 100,52. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 87,41. Pada tahun 2019, Perwakilan Maluku kembali dapat meningkatkan skor capaian IKU menjadi 92,03. Pada akhirnya, skor IKU tahun 2020 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku meraih skor sebesar 98,97.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target kinerja pada Tahun 2020. Adapun keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya arahan dari pimpinan di BPK Pusat dan kerja sama antar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja yang memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 9 indikator, yaitu IKU 2 terkait Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 Tingkat Pemenuhan

Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.

Adapun beberapa capaian kinerja yang tidak tercapai beserta analisa penyebab penurunan kinerja sebanyak 4 indikator, yaitu IKU 1, IKU 3, IKU 7, dan IKU 12. Penjelasan atas indikator signifikan yang menyebabkan penurunan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan belum memenuhi target yang ditetapkan. Kekurangan ini disebabkan oleh evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan nilai 83,33%. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan nilai 66,67%. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus mendorong pegawai untuk lebih memperhatikan konsistensi penulisan LHP, serta akan melakukan reviu redaksional atas konsep LHP sebelum diterbitkan.

IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum mencapai target yang disebabkan beberapa entitas yang masih sangat minim dalam menindaklanjuti rekomendasi, sehingga sangat berpengaruh pada persentase keseluruhan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan meningkatkan koordinasi dengan entitas-entitas di Provinsi Maluku agar masalah-masalah yang menghambat penyelesaian Tindak Lanjut dapat diselesaikan.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku mendapatkan nilai

4,59. Atas kekurangan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus mendorong pemahaman pegawai serta mensosialisasikan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK RI.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan jadwal diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPK RI sering bersamaan dengan jadwal penugasan pemeriksaan. Selain itu, beberapa pegawai tidak memenuhi jam diklat disebabkan jadwal *in house training* yang diadakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku bersamaan dengan penugasan dinas pegawai yang bersangkutan. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan tetap mengadakan *in house training* di Kantor Perwakilan Provinsi Maluku serta akan menghimbau para pegawai untuk melaksanakan diklat lebih awal sehingga tidak mengganggu penugasan atau cuti yang akan dilakukan.

Atas kondisi tersebut di atas, Perwakilan Provinsi Maluku juga akan melakukan peningkatan capaian kinerja khususnya terhadap kegiatan Tahun 2020 yang tidak mencapai target yang ditetapkan dengan mendorong pejabat struktural dan fungsional agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat meraih hasil yang lebih baik di Tahun 2021.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam meraih capaian kinerja Perwakilan Provinsi Maluku memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perwakilan. Sumber daya tersebut bersumber dari anggaran perwakilan Sumber daya lain yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan adalah optimalisasi kinerja pegawai Perwakilan Provinsi Maluku dalam melaksanakan seluruh rencana kerja perwakilan selama satu tahun anggaran. Setiap pegawai mendapat pengarahan langsung dan jelas dari atasan langsung masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Perwakilan Provinsi Maluku pada Tahun 2020 merupakan usaha bersama serta sinergi antara pimpinan dan staf. Adapun

beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka mencapai kinerja perwakilan antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *in house training*

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemeriksaan LKPD TA 2019, Perwakilan Provinsi Maluku melakukan *in house training* berupa rangkaian Diklat persiapan Pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan Pusdiklat. Materi yang disampaikan terkait dengan teknik pemeriksaan infrastruktur, diklat penggunaan SiAP LK, serta diklat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah daerah.



Gambar 1. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD

b. Perancangan Aplikasi SMART (*Service Management* Kesekretariatan Terpadu)

Dalam rangka memenuhi target Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku membuat usulan *Best Practice* yang berjudul Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Melalui Aplikasi *SMART (Service Management Kesekretariatan Terpadu)*. Pelayanan Kesekretariatan yang dilakukan secara manual dengan pengisian form dan persetujuan secara langsung kepada subbagian yang dituju menunjukkan bahwa pelayanan kesekretariatan saat ini masih diberikan berdasarkan permintaan (reaktif). Hal ini menggambarkan sangat perlunya suatu inovasi dalam menjembatani kondisi tersebut. Inovasi ini diharapkan bisa menghubungkan antara pengguna/stakeholder dengan penyedia layanan seefektif dan seefisien mungkin, dengan tetap mengedepankan aspek kemudahan, kecepatan, dan

keakurasian. Untuk itu, terobosan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku adalah aplikasi *SMART*. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan akurasi pelayanan kesekretariatan. Dan sejalan dengan program pemerintah selama masa pandemi *Covid-19* pemerintah menggalakkan *social distancing* artinya dengan aplikasi ini diharapkan pertemuan yang hanya dalam bentuk penyampaian dokumen dapat dikurangi.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi *SMART*

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam meraih capaian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Perwakilan Provinsi Maluku dengan Tortama KN VI, Perwakilan Provinsi Maluku telah mengupayakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Tahun 2020 selama masa pandemi *Covid-19*. Dari total anggaran sebesar Rp28.398.595.000,00, Perwakilan Provinsi Maluku telah memanfaatkan sebesar 60,44% atau sebesar Rp17.165.135.086,00 sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Pengukuran Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku selama Tahun 2020 sekaligus evaluasi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas sasaran strategis Tahun 2020 mencapai skor sebesar 98,97 dari target skor sebesar 100,00. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, Perwakilan Provinsi Maluku telah mencapai target yang telah ditetapkan..

Selanjutnya, informasi pencapaian kinerja dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat bagi pimpinan BPK RI dalam melakukan evaluasi agar dapat segera mengambil keputusan yang efisien dan efektif, serta dapat berguna bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam memperoleh gambaran mengenai arah dan fokus pelaksanaan kegiatan BPK RI dimasa mendatang.



Gambar 3. Pimpinan dan staf BPK Perwakilan Provinsi Maluku berfoto bersama

Pada akhirnya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan penyempurnaan untuk dapat meningkatkan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun sehingga dapat memberi kontribusi yang memadai bagi kinerja BPK RI secara keseluruhan (BPK *Wide*).

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN
PERJANJIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp20.642.164.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp8.128.298.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp12.513.866.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2016-2020		Capaian 2019	Capaian 2018	Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2020-2024		Target 2020	Capaian 2020
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	55,29%	61,12%	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,67%
2	IKU 1.2 Presentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
3	IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	102%	104%	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,13%
4	IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,71%
5	IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	100%	100%	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%
6	IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	30%	30%	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%
7	IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,59
8	IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	86,90
9	IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	24	24	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,71%
10	IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	0	50%	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%
11	IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	4,06
12	IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksaan BPK	4,75	4,5	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	90,24%
13	IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	90,63%	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	88,78%
14	IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%				
15	3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	4,19	3,49				

Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2016-2020		Capaian 2019	Capaian 2018	Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2020-2024		Target 2020	Capaian 2020
(1)		(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
16	3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,74	4,57				
17	3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%				
18	IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama dan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	BB				
19	IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,46%	95,6%				
20	IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice	1	1				
21	IKU 5.4 Persentase Penyebaran (Penerapan) Best-Practice	100%	0				
22	IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	94%	66%				
23	IKU 5.7 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94,61%	94,61%				
24	IKU 5.8 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	1				
25	IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	95,56%	93,02%				
26	IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	93,48%	95,24%				
27	IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	87,22%	78,02%				

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN TARGET LIMA TAHUN**

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2020	Persentase Realisasi Tahun 2020 dibanding Target Kinerja Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,67%	91,67%
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	73,13%	97,51%
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,71%	100,71%
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,59	91,80%
Hasil Evaluasi AKIP	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,90	101,05%
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	98,71%	103,91%
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,06	106,84%
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	90,24%	90,24%
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	88,78%	102,05%

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KINERJA ESELON II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Skor
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,67%	91,67
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,13%	97,51
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,71%	100,71
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,59	91,8
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	86,90	101,05
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,71%	103,91
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,06	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	90,24%	90,24
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	88,78%	102,05

REALISASI ANGGARAN

Program Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun
Periode 01 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020

Kementerian : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Jumlah Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini	%	
JUMLAH REALISASI	20.642.164.000	28.398.595.000	12.353.854.757	4.811.280.329	17.165.135.086	60,44	11.233.459.914
08 PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	20.642.164.000	28.398.595.000	12.353.854.757	4.811.280.329	17.165.135.086	60,44	11.233.459.914
08.1043 PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA	20.642.164.000	28.398.595.000	12.353.854.757	4.811.280.329	17.165.135.086	60,44	11.233.459.914
085 BAHAN PERUMUSAN PENDAPAT	15.627.000	15.627.000	0	10.237.800	10.237.800	65,51	5.389.200
085.008 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	15.627.000	15.627.000	0	10.237.800	10.237.800	65,51	5.389.200
051 Penyusunan Bahan Rumusan Pendapat	15.627.000	15.627.000	0	10.237.800	10.237.800	65,51	5.389.200
051.A Penyusunan Bahan Rumusan Pendapat	15.627.000	15.627.000	0	10.237.800	10.237.800	65,51	5.389.200
521211-RM BELANJA BAHAN	1.980.000	458.000	0	0	0	0,00	458.000
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	11.647.000	13.169.000	0	10.237.800	10.237.800	77,74	2.931.200
086 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN	597.416.000	645.416.000	182.757.232	426.913.053	609.670.285	94,46	35.745.715
086.010 Layanan Administrasi Pemeriksaan Pada Perwakilan	597.416.000	645.416.000	182.757.232	426.913.053	609.670.285	94,46	35.745.715
051 Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	20.452.000	217.936.000	17.172.950	194.487.000	211.659.950	97,12	6.276.050
051.A Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	20.452.000	217.936.000	17.172.950	194.487.000	211.659.950	97,12	6.276.050
521211-RM BELANJA BAHAN	16.452.000	7.200.000	7.000.000	0	7.000.000	97,22	200.000
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	3.843.950	0	3.843.950	96,09	156.050
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	194.736.000	6.329.000	183.237.000	189.566.000	97,34	5.170.000
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	0	12.000.000	0	11.250.000	11.250.000	93,75	750.000
052 Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan	373.626.000	337.965.000	103.268.784	209.919.253	313.188.037	92,66	24.776.963
052.A Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan	373.626.000	337.965.000	103.268.784	209.919.253	313.188.037	92,66	24.776.963
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	373.626.000	337.965.000	103.268.784	209.919.253	313.188.037	92,66	24.776.963
053 Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	55.824.000	51.340.000	46.880.498	0	46.880.498	91,31	4.459.502
053.A Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	55.824.000	51.340.000	46.880.498	0	46.880.498	91,31	4.459.502
521211-RM BELANJA BAHAN	1.440.000	0	0	0	0	0,00	0
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	1.035.100	0	1.035.100	25,87	2.964.900
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	50.384.000	47.340.000	45.845.398	0	45.845.398	96,84	1.494.602
054 Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	12.748.000	7.645.000	7.460.000	0	7.460.000	97,58	185.000
054.A Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	12.748.000	7.645.000	7.460.000	0	7.460.000	97,58	185.000
521211-RM BELANJA BAHAN	8.748.000	3.645.000	3.500.000	0	3.500.000	96,02	145.000
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	3.960.000	0	3.960.000	99,00	40.000
055 Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD	105.968.000	4.000.000	3.982.000	0	3.982.000	99,55	18.000
055.A Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD	105.968.000	4.000.000	3.982.000	0	3.982.000	99,55	18.000
521211-RM BELANJA BAHAN	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	3.982.000	0	3.982.000	99,55	18.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	100.768.000	0	0	0	0	0,00	0
056 Pelaksanaan Pengelolaan dan Implementasi e-audit	28.798.000	26.530.000	3.993.000	22.506.800	26.499.800	99,88	30.200
056.A Pelaksanaan Pengelolaan dan Implementasi e-audit	28.798.000	26.530.000	3.993.000	22.506.800	26.499.800	99,88	30.200
521211-RM BELANJA BAHAN	2.268.000	0	0	0	0	0,00	0

Uraian	Dagii Awal	Dagii Davisi	Jumlah Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini	%	
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	3.993.000	0	3.993.000	99,82	7.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	22.530.000	22.530.000	0	22.506.800	22.506.800	99,89	23.200
088 SUMBANGAN IHPS	137.680.000	137.680.000	113.286.420	20.435.804	133.722.224	97,12	3.957.776
088.008 Sumbangan IHPS Perwakilan	137.680.000	137.680.000	113.286.420	20.435.804	133.722.224	97,12	3.957.776
051 Penyusunan Sumbangan IHPS	137.680.000	137.680.000	113.286.420	20.435.804	133.722.224	97,12	3.957.776
051.A Penyusunan Sumbangan IHPS	137.680.000	137.680.000	113.286.420	20.435.804	133.722.224	97,12	3.957.776
521211-RM BELANJA BAHAN	11.616.000	968.000	0	0	0	0,00	968.000
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	4.000.000	3.987.500	0	3.987.500	99,68	12.500
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	122.064.000	132.712.000	109.298.920	20.435.804	129.734.724	97,75	2.977.276
091 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH KAP UNTUK DAN ATAS NAMA BPK	687.177.000	0	0	0	0	0,00	0
091.100 Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	687.177.000	0	0	0	0	0,00	0
051 Pelaksanaan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK pada Perwakilan	687.177.000	0	0	0	0	0,00	0
051.A Pelaksanaan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK pada Perwakilan	687.177.000	0	0	0	0	0,00	0
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	23.622.000	0	0	0	0	0,00	0
521211-RM BELANJA BAHAN	613.000	0	0	0	0	0,00	0
522131-RM BELANJA JASA KONSULTAN	313.088.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	316.554.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	300.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	33.000.000	0	0	0	0	0,00	0
130 LHP BPK PERWAKILAN PROV. MALUKU	3.688.163.000	3.202.602.000	2.397.302.824	672.508.406	3.069.811.230	95,85	132.790.770
130.001 LHP BPK Perwakilan Prov. Maluku	3.688.163.000	3.202.602.000	2.397.302.824	672.508.406	3.069.811.230	95,85	132.790.770
051 Perencanaan Pemeriksaan	47.821.000	36.576.000	36.570.560	0	36.570.560	99,98	5.440
051.A Perencanaan Pemeriksaan	47.821.000	36.576.000	36.570.560	0	36.570.560	99,98	5.440
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	47.821.000	36.576.000	36.570.560	0	36.570.560	99,98	5.440
052 Pelaksanaan Pemeriksaan	3.314.481.000	3.042.063.000	2.298.573.640	610.707.706	2.909.281.346	95,63	132.781.654
052.A Pelaksanaan Pemeriksaan	3.314.481.000	3.042.063.000	2.298.573.640	610.707.706	2.909.281.346	95,63	132.781.654
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	797.658.000	1.080.880.000	839.481.390	240.643.750	1.080.125.140	99,93	754.860
521131-RM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	2.937.000	2.937.000	0	2.937.000	100,00	0
522131-RM BELANJA JASA KONSULTAN	0	58.550.000	55.400.000	0	55.400.000	94,62	3.150.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	2.516.823.000	1.899.696.000	1.400.755.250	370.063.956	1.770.819.206	93,21	128.876.794
053 Pelaporan Pemeriksaan	325.861.000	123.963.000	62.158.624	61.800.700	123.959.324	99,99	3.676
053.A Pelaporan Pemeriksaan	325.861.000	123.963.000	62.158.624	61.800.700	123.959.324	99,99	3.676
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	99.853.000	123.963.000	62.158.624	61.800.700	123.959.324	99,99	3.676
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	226.008.000	0	0	0	0	0,00	0
170 LAPORAN PEMANTAUAN BPK PERWAKILAN PROV. MALUKU	196.176.000	196.176.000	32.800.000	145.700.376	178.500.376	90,98	17.675.624
170.001 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	98.088.000	98.088.000	19.680.000	75.569.320	95.249.320	97,10	2.838.680
051 Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	98.088.000	98.088.000	19.680.000	75.569.320	95.249.320	97,10	2.838.680
051.A Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	98.088.000	98.088.000	19.680.000	75.569.320	95.249.320	97,10	2.838.680
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	98.088.000	98.088.000	19.680.000	75.569.320	95.249.320	97,10	2.838.680
170.002 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	98.088.000	98.088.000	13.120.000	70.131.056	83.251.056	84,87	14.836.944
051 Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	98.088.000	98.088.000	13.120.000	70.131.056	83.251.056	84,87	14.836.944
051.A Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	98.088.000	98.088.000	13.120.000	70.131.056	83.251.056	84,87	14.836.944

Uraian	Dagii Awal	Dagii Davisi	Jumlah Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini	%	
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	98.088.000	98.088.000	13.120.000	70.131.056	83.251.056	84,87	14.836.944
174 LAPORAN PROFIL ENTITAS	9.808.000	9.808.000	3.905.000	0	3.905.000	39,81	5.903.000
174.008 Laporan Profil Entitas Perwakilan	9.808.000	9.808.000	3.905.000	0	3.905.000	39,81	5.903.000
051 Penyusunan Laporan Profil Entitas	9.808.000	9.808.000	3.905.000	0	3.905.000	39,81	5.903.000
051.A Penyusunan Laporan Profil Entitas	9.808.000	9.808.000	3.905.000	0	3.905.000	39,81	5.903.000
521211-RM BELANJA BAHAN	5.808.000	808.000	0	0	0	0,00	808.000
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	4.000.000	9.000.000	3.905.000	0	3.905.000	43,38	5.095.000
182 LAYANAN SEKRETARIAT PERWAKILAN	1.823.069.000	1.823.069.000	521.090.331	527.132.324	1.048.222.655	57,49	774.846.345
182.001 Layanan Hukum Perwakilan	327.244.000	327.244.000	83.510.656	89.962.200	173.472.856	53,01	153.771.144
051 Melaksanakan Layanan Bidang Hukum	327.244.000	327.244.000	83.510.656	89.962.200	173.472.856	53,01	153.771.144
051.A Melaksanakan Layanan Bidang Hukum	327.244.000	327.244.000	83.510.656	89.962.200	173.472.856	53,01	153.771.144
521211-RM BELANJA BAHAN	17.928.000	17.928.000	10.931.548	6.620.000	17.551.548	97,90	376.452
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	25.000.000	25.000.000	12.772.700	12.223.400	24.996.100	99,98	3.900
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	22.246.000	200.000	11.449.000	11.649.000	52,36	10.597.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	273.516.000	251.270.000	58.406.408	58.769.800	117.176.208	46,63	134.093.792
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	10.800.000	10.800.000	1.200.000	900.000	2.100.000	19,44	8.700.000
182.002 Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	322.630.000	322.630.000	56.993.500	165.650.574	222.644.074	69,00	99.985.926
051 Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	251.150.000	251.150.000	56.993.500	165.650.574	222.644.074	88,64	28.505.926
051.A Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan	251.150.000	251.150.000	56.993.500	165.650.574	222.644.074	88,64	28.505.926
521111-RM BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	20.520.000	20.520.000	12.460.000	3.192.000	15.652.000	76,27	4.868.000
521211-RM BELANJA BAHAN	41.062.000	41.062.000	14.856.200	11.687.000	26.543.200	64,64	14.518.800
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	8.000.000	8.000.000	7.800.900	147.500	7.948.400	99,35	51.600
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	22.246.000	200.000	15.300.000	15.500.000	69,67	6.746.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	177.968.000	155.722.000	20.776.400	134.874.074	155.650.474	99,95	71.526
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.600.000	3.600.000	900.000	450.000	1.350.000	37,50	2.250.000
052 Melaksanakan Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK	71.480.000	71.480.000	0	0	0	0,00	71.480.000
052.A Melaksanakan Kegiatan Pembinaan yang Dilaksanakan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK	71.480.000	71.480.000	0	0	0	0,00	71.480.000
521211-RM BELANJA BAHAN	38.880.000	38.880.000	0	0	0	0,00	38.880.000
521219-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	3.000.000
522141-RM BELANJA SEWA	23.600.000	23.600.000	0	0	0	0,00	23.600.000
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0,00	6.000.000
182.003 Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan	380.571.000	380.571.000	131.605.075	80.853.475	212.458.550	55,82	168.112.450
051 Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional	194.212.000	190.612.000	45.355.678	35.686.675	81.042.353	42,51	109.569.647
051.A Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional	194.212.000	190.612.000	45.355.678	35.686.675	81.042.353	42,51	109.569.647
521211-RM BELANJA BAHAN	21.708.000	21.708.000	15.443.170	6.241.500	21.684.670	99,89	23.330
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	11.000.000	11.000.000	6.119.650	4.761.375	10.881.025	98,91	118.975
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	18.646.000	200.000	17.149.000	17.349.000	93,04	1.297.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	153.104.000	130.858.000	15.942.858	6.784.800	22.727.658	17,36	108.130.342
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	7.200.000	7.200.000	6.450.000	750.000	7.200.000	100,00	0
052 Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai	186.359.000	189.959.000	86.249.397	45.166.800	131.416.197	69,18	58.542.803
052.A Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai	186.359.000	189.959.000	86.249.397	45.166.800	131.416.197	69,18	58.542.803

Uraian	Revisi Awal	Revisi	Jumlah Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini	%	
521211-RM BELANJA BAHAN	55.045.000	55.045.000	54.812.247	0	54.812.247	99,57	232.753
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	6.000.000	6.000.000	5.987.150	0	5.987.150	99,78	12.850
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	4.000.000	8.000.000	3.600.000	3.300.000	6.900.000	86,25	1.100.000
522191-RM BELANJA JASA LAINNYA	8.000.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	100,00	0
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	99.064.000	99.064.000	0	41.866.800	41.866.800	42,26	57.197.200
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	14.250.000	14.250.000	14.250.000	0	14.250.000	100,00	0
182.004 Layanan Keuangan Perwakilan	349.812.000	349.812.000	80.911.511	94.050.531	174.962.042	50,01	174.849.958
051 Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan	132.630.000	132.630.000	8.535.950	33.672.384	42.208.334	31,82	90.421.666
051.A Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan	132.630.000	132.630.000	8.535.950	33.672.384	42.208.334	31,82	90.421.666
521211-RM BELANJA BAHAN	12.366.000	12.366.000	3.100.050	5.826.550	8.926.600	72,18	3.439.400
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	14.000.000	14.000.000	3.335.900	8.719.800	12.055.700	86,11	1.944.300
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	99.064.000	99.064.000	0	14.176.034	14.176.034	14,31	84.887.966
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	7.200.000	7.200.000	2.100.000	4.950.000	7.050.000	97,91	150.000
052 Menyusun Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	127.224.000	102.458.000	6.197.500	33.957.916	40.155.416	39,19	62.302.584
052.A Menyusun Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	127.224.000	102.458.000	6.197.500	33.957.916	40.155.416	39,19	62.302.584
521211-RM BELANJA BAHAN	9.360.000	9.360.000	2.857.500	0	2.857.500	30,52	6.502.500
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	8.000.000	8.000.000	1.990.000	4.659.116	6.649.116	83,11	1.350.884
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	99.064.000	74.298.000	0	20.448.800	20.448.800	27,52	53.849.200
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	10.800.000	10.800.000	1.350.000	8.850.000	10.200.000	94,44	600.000
053 Menyusun Laporan Keuangan	89.958.000	114.724.000	66.178.061	26.420.231	92.598.292	80,71	22.125.708
053.A Menyusun Laporan Keuangan	89.958.000	114.724.000	66.178.061	26.420.231	92.598.292	80,71	22.125.708
521211-RM BELANJA BAHAN	11.220.000	11.220.000	2.756.300	1.955.800	4.712.100	41,99	6.507.900
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	12.000.000	12.000.000	2.321.300	8.664.431	10.985.731	91,54	1.014.269
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	24.766.000	800.000	15.800.000	16.600.000	67,02	8.166.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	66.738.000	66.738.000	60.300.461	0	60.300.461	90,35	6.437.539
182.005 Layanan Umum Perwakilan	442.812.000	442.812.000	168.069.589	96.615.544	264.685.133	59,77	178.126.867
051 Melaksanakan Layanan Administrasi Umum	91.242.000	91.242.000	35.489.409	28.395.500	63.884.909	70,01	27.357.091
051.A Melaksanakan Layanan Administrasi Umum	91.242.000	91.242.000	35.489.409	28.395.500	63.884.909	70,01	27.357.091
521211-RM BELANJA BAHAN	14.904.000	14.904.000	0	11.123.500	11.123.500	74,63	3.780.500
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	6.000.000	6.000.000	2.115.700	3.755.000	5.870.700	97,84	129.300
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	66.738.000	66.738.000	33.373.709	10.517.000	43.890.709	65,76	22.847.291
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.600.000	3.600.000	0	3.000.000	3.000.000	83,33	600.000
052 Mengelola Teknologi Informasi	70.626.000	70.626.000	0	0	0	0,00	70.626.000
052.A Mengelola Teknologi Informasi	70.626.000	70.626.000	0	0	0	0,00	70.626.000
521211-RM BELANJA BAHAN	3.888.000	3.888.000	0	0	0	0,00	3.888.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	66.738.000	66.738.000	0	0	0	0,00	66.738.000
053 Melakukan Pengurusan Sarana dan Prasarana	280.944.000	280.944.000	132.580.180	68.220.044	200.800.224	71,47	80.143.776
053.A Melakukan Pengurusan Sarana dan Prasarana	280.944.000	280.944.000	132.580.180	68.220.044	200.800.224	71,47	80.143.776
521211-RM BELANJA BAHAN	60.093.000	60.093.000	52.837.130	6.852.550	59.689.680	99,32	403.320
521811-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI	39.000.000	39.000.000	31.324.050	7.651.500	38.975.550	99,93	24.450
522191-RM BELANJA JASA LAINNYA	37.575.000	37.575.000	37.569.000	0	37.569.000	99,98	6.000
522192-RM BELANJA JASA - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	22.246.000	3.200.000	8.699.000	11.899.000	53,48	10.347.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	133.476.000	111.230.000	0	45.016.994	45.016.994	40,47	66.213.006
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	10.800.000	10.800.000	7.650.000	0	7.650.000	70,83	3.150.000
220 LHP ATAS BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU	141.888.000	141.888.000	138.150.500	0	138.150.500	97,36	3.737.500

Uraian	Revisi Awal	Revisi	Jumlah Realisasi Anggaran				Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini	%	
220.001 LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku	141.888.000	141.888.000	138.150.500	0	138.150.500	97,36	3.737.500
051 Pelaksanaan Pemeriksaan Banparpol	141.888.000	141.888.000	138.150.500	0	138.150.500	97,36	3.737.500
051.A Pelaksanaan Pemeriksaan Banparpol	141.888.000	141.888.000	138.150.500	0	138.150.500	97,36	3.737.500
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	43.788.000	43.788.000	42.911.500	0	42.911.500	97,99	876.500
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	98.100.000	98.100.000	95.239.000	0	95.239.000	97,08	2.861.000
262 LHP INTERIM/PENDAHULUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU	2.654.363.000	2.162.930.000	2.066.834.630	58.337.250	2.125.171.880	98,25	37.758.120
262.001 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku	2.654.363.000	2.162.930.000	2.066.834.630	58.337.250	2.125.171.880	98,25	37.758.120
051 Pelaksanaan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan	2.654.363.000	2.162.930.000	2.066.834.630	58.337.250	2.125.171.880	98,25	37.758.120
051.A Pelaksanaan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan	2.654.363.000	2.162.930.000	2.066.834.630	58.337.250	2.125.171.880	98,25	37.758.120
521119-RM BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA	658.282.000	539.715.000	475.534.500	58.337.250	533.871.750	98,91	5.843.250
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	1.996.081.000	1.623.215.000	1.591.300.130	0	1.591.300.130	98,03	31.914.870
951 LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	1.216.956.000	10.563.561.000	154.935.000	1.758.164.735	1.913.099.735	18,11	8.650.461.265
951.001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.216.956.000	10.563.561.000	154.935.000	1.758.164.735	1.913.099.735	18,11	8.650.461.265
051 Pengadaan kendaraan bermotor	64.956.000	107.956.000	0	64.200.000	64.200.000	59,46	43.756.000
051.A Pengadaan kendaraan bermotor	64.956.000	107.956.000	0	64.200.000	64.200.000	59,46	43.756.000
532111-RM BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	64.956.000	107.956.000	0	64.200.000	64.200.000	59,46	43.756.000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	208.000.000	0	199.921.000	199.921.000	96,11	8.079.000
052.A Perangkat TI untuk Kebutuhan BPK	0	208.000.000	0	199.921.000	199.921.000	96,11	8.079.000
532111-RM BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0	208.000.000	0	199.921.000	199.921.000	96,11	8.079.000
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	800.000.000	5.550.605.000	154.935.000	1.394.548.735	1.549.483.735	27,91	4.001.121.265
053.C Pengadaan mesin dan peralatan lainnya	800.000.000	2.229.420.000	154.935.000	569.574.717	724.509.717	32,49	1.504.910.283
532111-RM BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	800.000.000	2.229.420.000	154.935.000	569.574.717	724.509.717	32,49	1.504.910.283
053.D Pengadaan Fasilitas Kantor	0	3.321.185.000	0	824.974.018	824.974.018	24,83	2.496.210.982
532111-RM BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0	3.321.185.000	0	824.974.018	824.974.018	24,83	2.496.210.982
054 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	352.000.000	4.697.000.000	0	99.495.000	99.495.000	2,11	4.597.505.000
054.A Pembangunan Gedung Kantor	0	4.345.000.000	0	0	0	0,00	4.345.000.000
533111-RM BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0	4.345.000.000	0	0	0	0,00	4.345.000.000
054.C Perawatan gedung kantor dan rumah jabatan	352.000.000	352.000.000	0	99.495.000	99.495.000	28,26	252.505.000
533121-RM BELANJA PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN	352.000.000	352.000.000	0	99.495.000	99.495.000	28,26	252.505.000
994 LAYANAN PERKANTORAN	9.473.841.000	9.499.838.000	6.742.792.820	1.191.850.581	7.934.643.401	83,52	1.565.194.599
994.001 Layanan Perkantoran	9.473.841.000	9.499.838.000	6.742.792.820	1.191.850.581	7.934.643.401	83,52	1.565.194.599
001 Gaji dan Tunjangan	4.918.149.000	4.944.146.000	4.508.538.896	365.877.134	4.874.416.030	98,58	69.729.970
001.A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.918.149.000	4.944.146.000	4.508.538.896	365.877.134	4.874.416.030	98,58	69.729.970
511111-RM BELANJA GAJI POKOK PNS	2.921.040.000	3.755.054.000	3.479.899.060	270.447.000	3.750.346.060	99,87	4.707.940
511119-RM BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS	82.000	76.000	61.537	4.675	66.212	87,12	9.788
511121-RM BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS	197.758.000	232.809.000	213.589.968	17.226.390	230.816.358	99,14	1.992.642
511122-RM BELANJA TUNJ. ANAK PNS	52.438.000	61.598.000	55.088.012	4.511.418	59.599.430	96,75	1.998.570
511123-RM BELANJA TUNJ. STRUKTURAL PNS	136.220.000	134.050.000	124.320.000	9.730.000	134.050.000	100,00	0
511125-RM BELANJA TUNJ. PPH PNS	19.245.000	9.457.000	4.456.999	368.131	4.825.130	51,02	4.631.870
511126-RM BELANJA TUNJ. BERAS PNS	173.025.000	174.953.000	159.034.320	14.918.520	173.952.840	99,42	1.000.160
511129-RM BELANJA UANG MAKAN PNS	877.536.000	454.259.000	377.585.000	24.149.000	401.734.000	88,43	52.525.000
511151-RM BELANJA TUNJANGAN UMUM PNS	445.825.000	26.910.000	26.910.000	0	26.910.000	100,00	0
512211-RM BELANJA UANG LEMBUR	94.980.000	94.980.000	67.594.000	24.522.000	92.116.000	96,98	2.864.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.555.692.000	4.555.692.000	2.234.253.924	825.973.447	3.060.227.371	67,17	1.495.464.629
002.A Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dan TU	758.817.000	640.901.000	331.527.029	183.728.880	515.255.909	80,39	125.645.091
521111-RM BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	248.832.000	248.832.000	116.197.851	31.843.000	148.040.851	59,49	100.791.149

Uraian	Dagru Awal	Dagru Revisi	Jumlah Realisasi Anggaran				%	Sisa Anggaran
			Periode Lalu	Periode Ini	sd. Periode Ini			
521115-RM BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	38.400.000	38.400.000	25.600.000	12.800.000	38.400.000	100,00	0	
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	471.585.000	353.669.000	189.729.178	139.085.880	328.815.058	92,97	24.853.942	
002.B Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	125.000.000	242.916.000	140.700.980	77.201.240	217.902.220	89,70	25.013.780	
521131-RM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	77.916.000	74.890.500	0	74.890.500	96,11	3.025.500	
521832-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN LAINNYA	45.000.000	70.000.000	54.752.980	14.748.225	69.501.205	99,28	498.795	
521841-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN - PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	25.000.000	11.057.500	4.061.015	15.118.515	60,47	9.881.485	
522191-RM BELANJA JASA LAINNYA	80.000.000	70.000.000	0	58.392.000	58.392.000	83,41	11.608.000	
002.C Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	244.320.000	244.320.000	162.880.000	81.440.000	244.320.000	100,00	0	
521115-RM BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	244.320.000	244.320.000	162.880.000	81.440.000	244.320.000	100,00	0	
002.D Layanan Perkantoran Bidang Umum	3.427.555.000	3.427.555.000	1.599.145.915	483.603.327	2.082.749.242	60,76	1.344.805.758	
521111-RM BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	209.852.000	209.852.000	93.651.882	83.141.200	176.793.082	84,24	33.058.918	
521113-RM BELANJA PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	90.100.000	90.100.000	75.262.500	14.144.500	89.407.000	99,23	693.000	
521114-RM BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT	24.750.000	24.750.000	2.784.000	1.338.500	4.122.500	16,65	20.627.500	
521131-RM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	72.000.000	0	58.600.000	58.600.000	81,38	13.400.000	
522111-RM BELANJA LANGGANAN LISTRIK	540.000.000	540.000.000	267.300.093	42.780.489	310.080.582	57,42	229.919.418	
522112-RM BELANJA LANGGANAN TELEPON	72.000.000	72.000.000	31.263.130	6.192.660	37.455.790	52,02	34.544.210	
523111-RM BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1.933.304.000	1.893.304.000	933.748.865	196.691.705	1.130.440.570	59,70	762.863.430	
523121-RM BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	518.129.000	486.129.000	195.135.445	49.694.273	244.829.718	50,36	241.299.282	
523123-RM BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	39.420.000	39.420.000	0	31.020.000	31.020.000	78,69	8.400.000	